



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

		(Ribuan Rupiah)
	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	325.936.638.600
1	Pembiayaan Utang	399.219.360.282
1.1	Surat Berharga Negara (Neto)	414.520.685.000
1.2	Pinjaman (Neto)	-15.301.324.718
1.2.1	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	3.137.930.000
1.2.1.1	Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	4.500.000.000
1.2.1.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-1.362.070.000
1.2.2	Pinjaman Luar Negeri (Neto)	-18.439.254.718
1.2.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	51.345.917.282
1.2.2.1.1	Pinjaman Tunai	13.400.000.000
1.2.2.1.2	Pinjaman Kegiatan	37.945.917.282
1.2.2.1.2.1	Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	27.370.830.462
1.2.2.1.2.1.1	Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga	27.210.896.759
1.2.2.1.2.1.2	Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	159.933.703
1.2.2.1.2.2	Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	10.575.086.820
1.2.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	-69.785.172.000

2. Pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2	Pembiayaan Investasi	-65.654.313.274
2.1	Investasi Kepada BUMN	-3.600.000.000
2.1.1	PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-3.600.000.000
2.2	Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	-2.500.000.000
2.2.1	PMN kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	-2.500.000.000
2.3	Investasi Kepada BLU	-57.433.160.000
2.3.1	Dana Bergulir	-6.030.000.000
2.3.1.1	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	-2.180.000.000
2.3.1.2	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	-850.000.000
2.3.1.3	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	-2.500.000.000
2.3.1.4	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H)	-500.000.000
2.3.2	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	-15.000.000.000
2.3.3	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	-35.403.160.000
2.3.4	Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI)	-1.000.000.000
2.4	Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	-2.121.153.274
2.4.1	Islamic Development Bank (IDB)	-72.106.274
2.4.2	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	-41.339.000
2.4.3	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-53.600.000
2.4.4	International Development Association (IDA)	-152.880.000
2.4.5	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	-1.801.228.000
3	Pemberian Pinjaman	-6.690.093.408
3.1.	Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	-6.690.093.408



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3.1.1	Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Neto)	-6.690.093.408
3.1.1.1	Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto)	-10.575.086.820
3.1.1.2	Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda	3.884.993.412
4	Kewajiban Penjaminan	-1.121.315.000
5	Pembiayaan Lainnya	183.000.000
5.1	Hasil Pengelolaan Aset	183.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

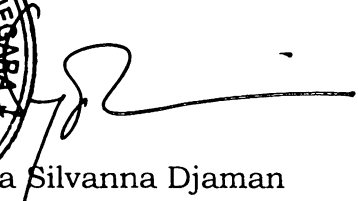
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Yulia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

POSTUR APBN TAHUN ANGGARAN 2018

		(Ribuan Rupiah)
A.	PENDAPATAN NEGARA	1.894.720.327.977
I.	PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.893.523.462.577
1.	PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.618.095.493.162
2.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	275.427.969.415
II.	PENERIMAAN HIBAH	1.196.865.400
B.	BELANJA NEGARA	2.220.656.966.577
I.	BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.454.494.390.020
II.	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766.162.576.557
C.	KESEIMBANGAN PRIMER	-87.329.517.230
D.	SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	-325.936.638.600
	<i>% Defisit Anggaran terhadap PDB</i>	2,19
E.	PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)	325.936.638.600
I.	PEMBIAYAAN UTANG	399.219.360.282
II.	PEMBIAYAAN INVESTASI	-65.654.313.274
III.	PEMBERIAN PINJAMAN	-6.690.093.408
IV.	KEWAJIBAN PENJAMINAN	-1.121.315.000
V.	PEMBIAYAAN LAINNYA	183.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Asisten Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Silvanna Djaman